

**ANALISIS PERMINTAAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017-2019****Muhammad Choerul Umam^{1✉}**¹Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro, Indonesia**Info Artikel***Sejarah Artikel:*

Diterima Februari 2023

Disetujui Maret 2023

Dipublikasikan Mei 2023

*Keywords:**Sektor industri pengolahan,**Upah minimum**kabupaten/kota, Jumlah**Perusahaan, Output,**Permintaan Tenaga Kerja***Abstrak**

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian Provinsi Jawa Barat. Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan yang cenderung rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten/kota, jumlah perusahaan, dan output terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan dari data cross section terdiri dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan data time series yaitu tahun 2017-2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengestimasi panel data yaitu Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah minimum kabupaten/kota, jumlah perusahaan, dan output berpengaruh secara simultan terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat. Secara parsial variabel upah minimum kabupaten/kota dan variabel jumlah perusahaan tidak berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat, sedangkan variabel output berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat.

Abstract

Manufacturing industries sector is one of the sectors with the largest contribution to the economy of West Java Province. However, this condition is inversely proportional to the absorption of labor in the manufacturing industries sector which tends to be low. This study aims to analyze influence of the district/city minimum wage, amount of unit industry, and output on the demand for labor in the manufacturing industries sector in West Java Province. The data used in this study is a combination of cross section data consist of 27 district/cities in West Java Province and 2017-2019 on time series data. The analytical method used in this study to estimate the panel data is the Fixed Effect Model (FEM). The results show that variables of the district/city minimum wage, amount of unit industry, and output simultaneously affect on the demand for labor in the manufacturing sector in West Java Province. Partially, the district/city minimum wage and variable amount of unit industry have no influence on the demand for labor in the manufacturing industries sector in West Java Province, while the variable output has a positive and significant influence on the demand for labor in the manufacturing industries sector in West Java Province.

✉ Alamat Korespondensi:

Alamat Korespondensi:

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedharto SH., Tembalang, Semarang 50239, Phone:

+6283862975654

Email: choerulumam85@gmail.com

PENDAHULUAN

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka kesejahteraan masyarakat umum (Sukirno, 2011). Pembangunan dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Pengaruh kualitas hidup penduduk memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi, sebaliknya penduduk yang berkualitas rendah akan menjadi beban dalam pembangunan (Todaro, 2011).

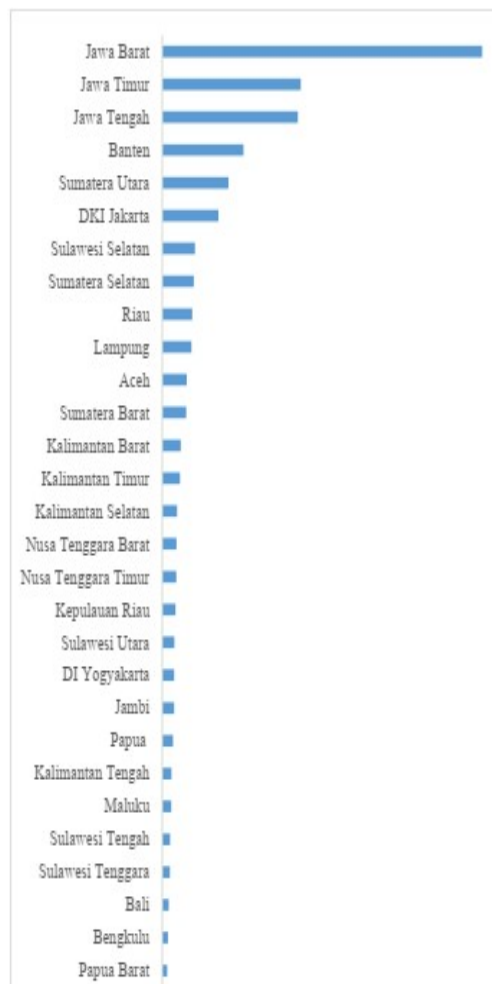
Dalam proses pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas utama karena dapat memicu penyerapan tenaga kerja yang akan menciptakan kesejahteraan. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat dilakukan dengan cara meningkatkan produksi (Raharjanti, 2019). Teori produksi oleh Cobb Douglas mengatakan bahwa total produksi berasal dari peningkatan input tenaga kerja, modal dan teknologi. Sehingga meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang akan mendorong peningkatan input tenaga kerja sehingga menciptakan kesejahteraan dalam pembangunan ekonomi (Kaufman dan Hotchkiss, 2005)

Jumlah penduduk Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu 2017-2019 selalu mengalami peningkatan, hingga tahun 2019 terdapat 268.074.600 jiwa, begitu juga dengan jumlah angkatan kerja selama 3 tahun terakhir yaitu selama periode tahun 2017-2019 selalu mengalami peningkatan jumlah angkatan kerja dari 128.062.746 jiwa di tahun 2017 menjadi 135.859.695 jiwa pada tahun 2019. Peningkatan jumlah penduduk tersebut diiringi pula dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja, namun peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut tidak seluruhnya terserap di dunia kerja sehingga menimbulkan pengangguran. Jumlah pengangguran di Indonesia selama kurun waktu tahun 2017-2019 mengalami peningkatan.

Apabila dilihat dari persebarannya masalah pengangguran terdapat diseluruh provinsi di Indonesia. Gambar 1 dapat dilihat

bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa memiliki jumlah pengangguran lebih tinggi daripada pulau lainnya. Peringkat pertama jumlah pengangguran tertinggi di Indonesia berada di Provinsi Jawa Barat. Jumlah pengangguran pada provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia cenderung lebih rendah yaitu Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 1
Jumlah Pengangguran Dirinci Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2019



Provinsi Jawa Barat menempati peringkat pertama sebagai provinsi dengan jumlah pengangguran tertinggi di Indonesia. Padahal dalam Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Barat (2015) mencatat bahwa, hampir 60 persen industri pengolahan

di Indonesia berlokasi di Provinsi Jawa Barat. Dari 74 kawasan industri yang tersebar di Indonesia, 40 kawasan industri terletak di Provinsi Jawa Barat,. Oleh karena itu, seharusnya sektor industri tersebut mampu menciptakan kesempatan kerja yang besar di Provinsi Jawa Barat.

Menurut Kecuk Suhariyanto dalam Raharjanti (2019) menyatakan bahwa rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri menjadi penyebab pengangguran. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2011) mengatakan bahwa peranan sektor manufaktur dan jasa akan mengalami perkembangan sementara sektor pertanian mengalami penurunan.

Sektor industri pengolahan didalam pembangunan ekonomi memiliki peranan sangat penting dan bersifat dinamis. Kondisi perekonomian ditentukan oleh besarnya keterkaitan sektor industri pengolahan dengan sektor lainnya. Pertumbuhan sektor industri pengolahan dapat mendorong dan menarik pertumbuhan sektor lainnya karena sektor industri memerlukan input dari output yang dihasilkan oleh sektor lain. Oleh karena itu, sektor industri pengolahan sering dipercaya sebagai mesin pertumbuhan nasional. Perkembangan sektor industri pengolahan merupakan yang tercepat dibandingkan dengan sektor-sektor lain dan telah dapat menyediakan kesempatan kerja yang sangat berarti dan produktif. Lain halnya dengan sektor lain seperti jasa-jasa dan pertanian yang banyak menampung tenaga kerja informal yang kurang produktif. (Mirdad dan Akhbar, 2018). Sumbangan pendapatan sektor industri pengolahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sangat besar, maka bukan tidak mungkin apabila harapan kesempatan kerja yang besar diperoleh dari sektor ini. Seperti yang terlihat dalam tabel 1 tentang produk domestik regional bruto menurut lapangan usaha dan kontribusi sektoral di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut

Tabel 1 PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019

Lapangan Usaha	Tahun		
	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	99.669	101.752	104.597
	7,42	7,17	7,01
Pertambangan dan Penggalan	26.590	25.491	24.791
	1,98	1,80	1,66
Industri Pengolahan	578.703	616.427	641.352
	43,07	43,42	43,00
Listrik, Gas dan Air Minum	6.519	6.574	6.543
	0,49	0,46	0,44
Konstruksi	111.001	119.305	126.631
	8,26	8,40	7,43
Perdagangan Hotel dan Restoran	243.148	254.771	273.800
	18,10	17,95	18,36
Pengangkutan dan Komunikasi	117.786	126.123	134.925
	8,77	8,88	9,05
Lembaga Keuangan dan Jasa Real Estate	56.074	59.669	62.716
	4,17	4,20	4,20
Jasa-Jasa	104.172	109.511	116.220
	6,70	6,84	7,79

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Pada tabel 1 terlihat bahwa dari 9 sektor lapangan usaha, sektor industri pengolahan memiliki sumbangan terbesar dibandingkan dengan sektor lapangan usaha lainnya. Tingginya sumbangan sektor industri pengolahan mengindikasikan terbukanya kesempatan kerja yang besar. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan rendahnya daya serap di sektor industri pengolahan.

Squire dalam Setiawan (2010) mengatakan secara konseptual tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat upah, jumlah unit usaha dan nilai output. Kaufman dan Hotchkiss (2005) mengatakan penetapan tingkat upah yang dilakukan oleh pemerintah, serikat pekerja, dan kalangan pengusaha pada suatu negara akan memberikan pengaruh pada pengangguran. Semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan, maka akan memberikan pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran. Hal ini

bisa terjadi karena semakin tinggi upah, perusahaan akan mengeluarkan biaya besar. Akibatnya perusahaan akan melakukan efisiensi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja.

Berbeda hal dengan upah, meningkatnya jumlah perusahaan cenderung meningkatkan daya serap tenaga kerja. Squire dalam Setiawan (2010) mengatakan pertumbuhan unit usaha suatu sektor industri pada suatu wilayah akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Jumlah unit usaha mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah tenaga kerja. Artinya jika jumlah unit usaha mengalami peningkatan maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh unit usaha tersebut akan bertambah.

Begitu juga dengan pertumbuhan output yang dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah tenaga kerja. Sumarsono (2009) mengatakan perkembangan permintaan pasar mempengaruhi hasil produksi dari perusahaan. Apabila permintaan pasar akan hasil produksi mengalami peningkatan, produsen cenderung menambah kapasitas produksi sehingga perusahaan akan menambah jumlah tenaga kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismei, *et al* (2015) dengan judul “Analisis Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013”. Ismei menemukan bahwa variabel nilai produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan semakin meningkat nilai produksi, maka permintaan tenaga kerja sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Lamongan juga akan semakin meningkat. Namun, hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2010) dengan judul “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Semarang”. Setiawan menemukan bahwa variabel berpengaruh positif tetapi tidak signifikan hal ini dikarenakan kenaikan output belum mampu bagi UKM untuk menambah Jumlah Tenaga Kerja. Semakin meningkatnya Nilai Output dari UKM, belum tentu kebutuhan tenaga kerja juga akan meningkat. Hal ini

disebabkan kapasitas produksi yang terbatas di mana untuk meningkatkan nilai produksi (output) hanya dapat dilakukan melalui perbaikan teknologi dan peningkatan kualitas tenaga kerja antara lain melalui pendidikan dan latihan yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Penelitian ini berfokus untuk melihat pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Jumlah Perusahaan, dan Output terhadap Permintaan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019.

TINJAUAN PUSTAKA

Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan adalah banyaknya jumlah barang dan jasa yang bersedia dibeli oleh konsumen. Jumlah barang yang bersedia dibeli konsumen dapat bergantung dari hal-hal lain di samping harga barang tersebut. Khususnya pendapatan, dengan pendapatan yang semakin tinggi, konsumen dapat membelanjakan lebih banyak uang untuk barang tersebut (Pindyck dan Rubinfeld, 2009). Permintaan akan tenaga kerja merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara upah dengan jumlah tenaga kerja yang diminta (Haryani, 2002)

Permintaan Tenaga Kerja Jangka Pendek

Permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek mengondisikan bahwa suatu perusahaan dapat memproduksi apabila ada faktor-faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja. Dalam jangka pendek perusahaan tidak dapat menambah modal dalam peningkatan jumlah produksi, karena dalam jangka pendek modal bersifat konstan. Maka untuk dapat meningkatkan jumlah output, perusahaan hanya dapat menambah jumlah tenaga kerja (Arfida, 2003).

Permintaan Tenaga Kerja Jangka Panjang

Permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang memberikan kebebasan pada perusahaan untuk melakukan penyesuaian dalam memilih setiap bentuk kombinasi modal dan tenaga kerja, maka perusahaan akan menghasilkan output dengan

menggunakan berbagai kombinasi tenaga kerja dan modal yang mana saja asalkan mengandung biaya yang paling rendah. Apabila rasio biaya tenaga kerja terhadap biaya modal harus mengalami perubahan, maka kombinasi optimal tenaga kerja dan modal dengan setiap tingkatan output yang diberikan harus dihasilkan. Jika sekiranya tingkat upah harus di naikan, maka setiap kemungkinan tingkat output haruslah dihasilkan dengan tenaga kerja yang lebih sedikit dan modal yang lebih banyak. Produsen akan mensubstitusikan input tenaga kerja dengan modal dalam jangka panjang agar dapat menghasilkan setiap tingkat output dengan biaya yang rendah. (Bellante dan Jackson 1990)

Elastisitas Permintaan Tenaga Kerja

Elastisitas permintaan tenaga kerja dapat diartikan persentase perubahan permintaan akan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan satu persen pada tingkat upah. Secara umum dituliskan dengan persamaan:

$$e = \frac{\Delta N/N}{\Delta W/W} \dots \dots \dots (2.5)$$

Keterangan:

e : Elastisitas Permintaan Tenaga Kerja

ΔN : Jumlah Perubahan jumlah pekerja

N : Jumlah pekerja mula-mula

ΔW : Jumlah perubahan tingkah upah

W : Tingkat upah yang berlaku

Hubungan Antar Variabel

Hubungan Upah Minimum Terhadap Permintaan Tenaga Kerja

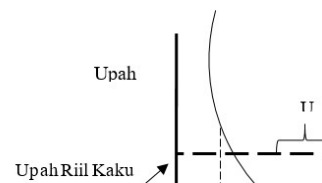
Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja

(Simanjuntak, 2001). Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 7 Tahun 2013 tentang upah minimum. Upah minimum yang ditetapkan berdasarkan pada Kebutuhan Fisik Hidup Layak berupa kebutuhan pangan.

Mankiw (2006) mengatakan Undang-undang upah minimum menetapkan tingkat upah minimal yang harus dibayar oleh perusahaan kepada karyawannya. Ketika pemerintah mempertahankan upah agar tidak mencapai tingkat ekuilibrium, hal itu dapat menimbulkan kekakuan upah yaitu gagalnya upah dalam melakukan penyesuaian sampai penawaran sama dengan permintaan tenaga kerja. Bagi sebagian besar pekerja, upah minimum tidak berpengaruh, karena mereka menikmati upah diatas tingkat ekuilibrium. Bagi sebagian lainnya, terutama pekerja yang tidak terdidik dan kurang berpengalaman, upah minimum dapat meningkatkan upah mereka diatas ekuilibrium.

Pada gambar 2 menunjukan kekakuan upah yang mana ketika upah riil berada di atas tingkat keseimbangan akibat diberlakukan upah minimum yang menyebabkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Perusahaan harus menjatah pekerjaan yang langka di antara para pekerja. Kekakuan upah riil mengurangi tingkat perolehan kerja dan meningkatkan pengangguran (Mankiw, 2006).

Gambar 2 Kekakuan Upah Riil
Kekakuan U



Sumber : Mankiw, 2006

Hubungan Jumlah Perusahaan Terhadap Permintaan Tenaga Kerja

Squire dalam Setiawan (2010) mengatakan bahwa pertumbuhan unit usaha suatu sektor industri pada suatu wilayah akan menambah jumlah tenaga kerja. Jumlah unit usaha mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah tenaga kerja. Artinya jika jumlah unit usaha bertambah maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh unit usaha yang bersangkutan akan bertambah.

Permatasari (2016) mengatakan untuk menentukan tolak ukur, suatu unit usaha untuk mengurangi atau menambah kuantitas tenaga kerja, maka pengusaha melakukan berbagai tindakan sebagai berikut :

- Pengusaha membutuhkan modal yang lebih besar untuk mendirikan perusahaan yang lebih banyak untuk mendapatkan output yang lebih banyak pula , maka jumlah tenaga kerja pun harus ditambah
- Dalam suatu daerah, memiliki nilai output yang berbeda-beda guna memperkirakan hasil produksi dengan cara menambah jumlah perusahaan yang memproduksi barang yang sama

Maka, dapat disimpulkan bahwa bertambahnya jumlah perusahaan kemungkinan akan menambah jumlah produksi yang membutuhkan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak untuk menghasilkan output yang maksimal bagi setiap perusahaan.

Hubungan Output Terhadap Permintaan Tenaga Kerja

Arfida (2003) mengatakan bahwa pengaruh output terhadap permintaan terhadap tenaga kerja dimulai dari penurunan tingkat upah pasar. Dalam jangka panjang terdapat dua hal terjadi apabila perusahaan mengalami penurunan tingkat upah pasar yaitu:

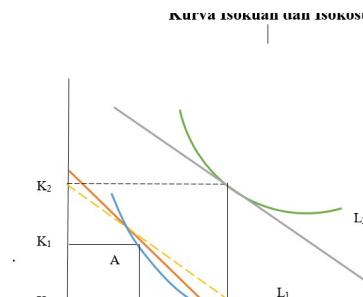
Pertama, biaya produksi perusahaan mengalami penurunan, dengan asumsi harga produk konstan, maka penurunan biaya ini akan menaikkan kuantitas output yang memaksimalkan keuntungan. Untuk alasan tersebut perusahaan akan memperluas penggunaan tenaga kerja. Hal ini disebut sebagai pengaruh output terhadap perubahan upah. Dalam jangka pendek peningkatan output hanya dapat dilakukan dengan cara

meningkatkan kuantitas penggunaan tenaga kerja.

Kedua, harga tenaga kerja yang relatif W/P_k mengalami penurunan. Setiap Kecondongan garis *isokos* mengalami perubahan, dan berakibat pada jumlah output yang dihasilkan dengan kombinasi input yang menyerap lebih banyak jumlah tenaga kerja dan modal lebih sedikit dibandingkan kombinasi sebelumnya. Hal ini disebut sebagai pengaruh substitusi terhadap perubahan upah.

Pada gambar 3 diketahui bahwa pengaruh output dan substitusi suatu perusahaan sebagai reaksi panjang terhadap turunnya upah. Pada awalnya perusahaan berada pada ekuilibrium titik A dengan penggunaan tenaga kerja sebesar L_1 . Karena biaya produksi mengalami penurunan sebagai akibat dari penurunan upah, maka perusahaan lebih memilih untuk menghasilkan output yang lebih banyak yang ditunjukkan dengan perpindahan menuju *isokuan* L_2 . Kombinasi input untuk meminimumkan biaya ditunjukkan pada titik C dengan penggunaan tenaga kerja lebih banyak dibandingkan titik B. Perpindahan dari titik A ke titik B adalah pengaruh substitusi, sedangkan perpindahan dari titik B ke C adalah pengaruh output. Pengaruh output dan substitusi saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini dikarenakan pengaruh output hanya relevan pada jangka pendek, sedangkan pengaruh substitusi hanya berlangsung dalam jangka panjang. Berikut adalah kurva isokuan ditunjukkan gambar

Gambar 3 Kurva Isokuan dan Isokost



Sumber : Arfida (2003)

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Dalam studi ini digunakan dua jenis variabel penelitian, yaitu variabel dependen atau variabel tak bebas (*dependent variable*) dan variabel independen atau variabel bebas (*independent variable*).

Variabel Dependen

Variabel Dependen merupakan variabel yang besarannya dipengaruhi oleh variabel lain. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam proses produksi maupun non produksi sektor industri pengolahan di 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang dinyatakan dalam satuan orang.

Variabel Independen

Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah merupakan nilai jasa yang dibayarkan pengusaha kepada karyawan sebagai imbalan terhadap jasa karyawan yang diberikan kepada pengusaha. Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah minimum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota berdasarkan 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019. Variabel ini dinyatakan dalam rupiah per tahun

Jumlah Perusahaan

Jumlah Perusahaan adalah banyaknya perusahaan sektor industri pengolahan yang ada pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yakni 27 kabupaten/kota pada tahun 2017-2019. Variabel jumlah perusahaan dinyatakan dalam satuan unit

Output Sektor Industri Pengolahan

Output Sektor Industri Pengolahan adalah nilai total dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu usaha industri selama

satu tahun di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2017-2019 yang diukur dengan satuan miliar rupiah.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber tidak langsung dengan obyek yang diteliti atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian di mana data ini diperoleh dari instansi atau lembaga terkait. Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan penggabungan data runtut waktu (*time series*) dan data antar unit (*cross section*). Data *time series* yang digunakan yaitu tahun 2017-2019 dan data *cross section* yaitu 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sehingga menghasilkan 81 observasi.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi. Soewadji (2012) mengatakan bahwa metode dokumentasi merupakan cara mencari data atau informasi yang bersumber dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti dan lain-lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pencatatan dari instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan instansi lain yang terkait dengan penelitian ini.

Metode Analisis

Data Panel merupakan kombinasi dari data *time series* dan data *cross-section*. Data *time series* merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu, sedangkan *cross-section* adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Gujarati dan Porter (2015) mengatakan teknik data panel memberikan keunggulan dibandingkan dengan pendekatan standar *cross-section* dan *time series*

Estimasi Regresi Data Panel

Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini di adaptasi dari Gujarati dan Porter (2015) yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel upah minimum kabupaten/kota, jumlah perusahaan, output

terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat. Persamaan data panel dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$PTK_{it} = \beta_0 + \beta_1 UMKit + \beta_2 JPit + \beta_3 NPit + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(3.1)$$

Keterangan:

PTK_{it} = Permintaan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Jawa Barat (Orang)

UMK = Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rupiah)

JP = Jumlah Perusahaan (Unit) Permintaan

NP = Nilai Produksi atau Output (Miliar Rupiah)

β_0 = Konstanta Regresi Umk

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Slope atau koefisien regresi Jumlah

i = Cross section (27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat)

t = Time series (Tahun 2017-2019) Sumber : Lampiran B, Hasil olah data dengan Eviews 10

ε = Error Term

Pada model data panel menggunakan persamaan Logaritma (Log) yang bertujuan untuk memudahkan estimasi. Gujarati dan Porter (2015) menyatakan bahwa model Logaritma (Log) digunakan untuk mengukur elastisitas variabel dependen terhadap variabel independen. Persamaan data panel dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Log}PTK_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}UMKit + \beta_2 \text{Log}JPit + \beta_3 \text{Log}NPit + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(3.2)$$

Keterangan :

$\text{Log}PTK_{it}$ = Logaritma dari Permintaan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Jawa Barat

$\text{Log}UMK$ = Logaritma dari Upah Minimum Kabupaten/Kota

$\text{Log}JP$ = Logaritma dari Jumlah Perusahaan

$\text{Log}NP$ = Logaritma Dari Nilai Produksi atau Output

β_0 = Konstanta Regresi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Slope atau koefisien regresi

i = Cross section (27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat)

t = Time series (Tahun 2017-2019)

ε = Error Term

HASIL DAN PEMBAHASAN,

Variabel yang digunakan meliputi permintaan tenaga kerja, upah minimum kabupaten/kota, jumlah perusahaan dan output. Tabel 2 menunjukkan deskripsi statistik variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel.2 Hasil Deskriptif Statistik

Variabel	Mean	Std. Deviasi	Minimum	Maximum
Permintaan Tenaga Kerja	80608	115306	241	588010
Upah Minimum	2531720	818412	1433901	4234010
Jumlah Perusahaan	349	517	8	2503
Output	80931068732	164678381338	20212789	164678381338

Berdasarkan tabel 2, diperoleh rata-rata permintaan tenaga kerja sektor industri pengolahan dari 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2017 – 2019 sebesar 80608 orang dengan standar deviasi sebesar 115306. Selanjutnya, rata-rata upah minimum kabupaten/kota dari 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2017 – 2019 sebesar Rp. 2.531.720 dengan standar deviasi sebesar 818412. Sementara itu rata-rata jumlah perusahaan sektor industri pengolahan dari 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2017 – 2019 sebesar 349 dengan standar deviasi sebesar 517. Sedangkan rata-rata output sektor industri pengolahan dari 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2017 – 2019 sebesar Rp 80.931.068.732 miliar, dengan standar deviasi sebesar 164678381338.

Hasil Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

Deteksi Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana salah satu variabel bebas berkorelasi dengan variabel bebas lainnya (Ghozali dan Ratmono, 2013). Masalah multikolinearitas timbul jika variabel-variabel independen

berhubungan satu dengan yang lain. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam penelitian adalah dengan melihat nilai koefisien berpasangan dari *Correlation Matrix* di antara regresor yang berbeda. Apabila nilai koefisien yang terjadi antar regresor yang berbeda tidak melebihi nilai 0,9 (*rule of thumb*) maka dikatakan model yang diteliti tidak terdeteksi masalah multikolinearitas. Hasil deteksi multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3 Hasil Deteksi Multikolinearitas

	LOGUMK	LOGJP	LOGNP
LOGUMK	1	0.605466	0.756065
LOGJP	0.605466	1	0.872267
LOGNP	0.756065	0.872267	1

Sumber :Lampiran E, Hasil olah data dengan Eviews 10

Pada tabel 3 menunjukkan nilai *Correlation Matrix* antar regresor. Nilai koefisien antar regresor yang berbeda tidak ada yang melebihi *rule of thumb* (0,9) maka dapat disimpulkan model estimasi dalam penelitian ini tidak terdeteksi gejala multikolinearitas.

Deteksi Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* residual. Pada penelitian ini menggunakan uji glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregres nilai *absolute residual* (AbsUi) terhadap variabel independen lainnya. Jika pengujian secara statistik dari hasil regresi menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan tingkat signifikansi α (0,05) maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Hasil deteksi Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4 Hasil Deteksi Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	-0.597337	0.901478	-0.662620	0.5106
UMK	0.059750	0.128776	0.463988	0.6446
JP	0.147758	0.080249	1.841246	0.0714
OUTPUT	-0.006924	0.017896	-0.386935	0.7004

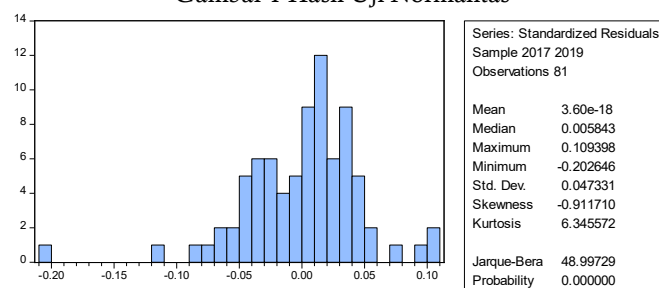
Sumber :Lampiran E, Hasil olah data dengan Eviews

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai probabilitas masing-masing variabel adalah lebih besar dari tingkat signifikansinya ($\alpha = 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini memiliki varians residual yang sama (homokedastisitas) atau tidak terdapat heteroskedastisitas.

Deteksi Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Jarque-Berra*. Hasil deteksi normalitas dapat dilihat pada gambar 4.5

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas



Sumber :Lampiran E, Hasil olah data dengan Eviews 10

Berdasarkan gambar 4.5 menunjukkan nilai *jarque-berra* sebesar 48,99729 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000000 signifikan pada tingkat derajat kesalahan ditetapkan α (0,05). maka dapat disimpulkan bahwa H_0 yang menyatakan model regresi (residual) terdistribusi normal dapat ditolak. Dengan kata lain, asumsi residual terdistribusi normal dalam penelitian ini tidak terpenuhi atau model regresi (residual) tidak terdistribusi normal. Gujarati dan Porter (2015) mengatakan bahwa dalam sebuah sampel yang cukup besar, pengujian statistik t dan F memiliki pendekatan distribusi t

dan F, sehingga pengujian t dan F berdasarkan asumsi yang menjelaskan bahwa *residual* yang terdistribusi secara normal masih dapat diaplikasikan dengan benar. Banyaknya data *cross section* dan *time series* yang cukup besar, membuat asumsi normalitas dapat diabaikan dalam data set yang cukup besar.

Deteksi Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antar kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Pada penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Autokorelasi dapat di deteksi dengan melakukan perbandingan nilai d dengan dl (batas bawah) dan du (batas atas) pada statistik Durbin-Watson.

Ta Hasil estimasi regresi dalam penelitian ini menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,573065. Nilai Durbin-Watson tersebut dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson dengan T (jumlah pengamatan) sebanyak 81 dan K (jumlah variabel bebas dan intercep) sebesar 3, maka dalam tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai:

T: 81,

K: 3.

dl: 1,5632

du: 1,7164

4-dl: 2,4368

4-du: 2,2836

Dari hasil diatas kita peroleh 4 angka, kemudian di urutkan angkanya menjadi:

Tabel 5 Hasil Nilai Uji Durbin-Watson

DW	dl	Du	4-du	4-dl
2,573065	1,5632	1,7164	2,2836	2,4368

Sumber : Lampiran C, Hasil olah data Eviews 10

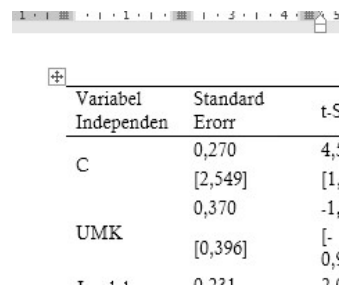
Berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai dl sebesar 1,5632 dan du sebesar 1,7164. Nilai Durbin-Watson sebesar 2,573065 terletak di daerah lebih besar daripada (4-dl), ($DW = 2,573065 > 4-DL = 2,4368$), maka dapat disimpulkan bahwa koefisien autokorelasi lebih

kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.

Metode Perbaikan Newey-West HAC

Pada Penelitian ini terdapat masalah gejala autokorelasi positif yang mana dapat mengakibatkan observasi menjadi bias atau tidak valid, maka perlu dihilangkan. Untuk memperbaiki masalah autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode Newey-West. Metode newey-west digunakan untuk memperbaiki standrad error OLS pada suatu penelitian. Koreksi *standard error* dalam masalah autokorelasi dengan menggunakan prosedur yang dikembangkan oleh Newey-West. Prosedur ini merupakan pengembangan dari *White heteroscedascity-consitent standard error*.

Tabel 6. Hasil Estimasi Dengan Metode Newey-West HAC



Variabel Independen	Standard Error	t-Stat
C	0,270 [2,549]	4,5 [1,6]
UMK	0,370 [0,396]	-1,6 [-0,9]

Sumber : Hasil olah data Eviews 10

Keterangan: tanda [] menjelaskan nilai yang telah dikoreksi dengan menggunakan metode Newey-West HAC

Berdasarkan tabel 6 menunjukan bahwa terdapat perbedaan dalam nilai *standard error*, nilai t dan nilai probabilita antara metode OLS dengan metode hasil koreksi Newey-West HAC yang mana hasil koreksi Newey-West HAC dengan melakukan koreksi standard errorr OLS yang semula bias pada standard errorrnya akibat keberadaan autokorelasi menjadi tidak bias, serta hasilnya menjadi lebih valid dibandingkan hasil OLS tanpa koreksi.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Hasil estimasi model regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,993456. Penggunaan *Adjusted R-Squared* dipilih karena nilai R^2 yang dihasilkan sudah disesuaikan atau dikoreksi sehingga lebih baik untuk mengetahui kesesuaian model.

Nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,993456 menunjukkan bahwa variabel upah, jumlah perusahaan dan output mampu menjelaskan variasi dari variabel permintaan tenaga kerja sebesar 99,34 persen. Sedangkan 0,66 persen lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi tersebut.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji Signifikansi Simultan atau uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji signifikansi simultan (Uji F) menunjukkan apakah seluruh variabel independen dalam penelitian memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen.

Pada penelitian ini hasil estimasi pengaruh upah minimum kabupaten/kota, jumlah perusahaan dan output terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa dengan menggunakan taraf keyakinan 95 persen ($\alpha = 5$ persen), *degree of freedom for numerator* (dfn) = 3 ($k - 1 = 4-1$), dan *degree of freedom for denominator* (dfd) = 77 ($N - k = 81 - 4$), maka diperoleh nilai F tabel sebesar 2,72. Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.5 diperoleh F-statistik sebesar 419,7810 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen karena nilai F hitung > nilai F tabel. Hal ini berarti semua variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Signifikansi Individu (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual (parsial) terhadap variasi dari variabel dependen. Pada penelitian ini dengan menggunakan taraf keyakinan 95 persen ($\alpha = 5$ persen) nilai degree of freedom (df) sebesar 77 ($N - k = 81 - 4$), maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,66488. Berdasarkan hasil regresi yang telah dikoreksi dengan metode Newey-West seperti yang terlihat pada tabel 4.9 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel upah minimum kabupaten/kota memiliki nilai t-statistik sebesar -0,98144 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,66488 dan nilai probabilitas lebih besar dari α (0,05) dengan nilai koefisien yang negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel upah upah minimum kabupaten/kota berpengaruh secara negatif namun tidak signifikan terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri pengolahan.
2. Variabel jumlah perusahaan memiliki nilai t-statistik sebesar 1,53730 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,66488 dan nilai probabilitas lebih besar dari α (0,05) dengan nilai koefisien yang positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel jumlah perusahaan berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri pengolahan.
3. Variabel output memiliki nilai t-statistik sebesar 3,18355 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,66488 dan nilai probabilitas lebih kecil dari α (0,05) dengan nilai koefisien yang positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel output berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri pengolahan.

Tabel 7 Uji Signifikansi t

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob	Kesimpulan
Upah	-0,389352	-0,981441	0,3310	Tidak signifikan
Jumlah Perusahaan	0,467756	1,537305	0,1304	Tidak Signifikan
Output	0,155363	3,183553	0,0025	Signifikan

Sumber : Hasil olah data dengan eviews 10

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Permintaan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan

Dari hasil estimasi diperoleh bahwa secara parsial UMK tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut terlihat dari nilai koefisien sebesar -0,389352 dan nilai probabilitasnya yang lebih besar dari α (0,05).

Hasil tersebut sejalan penelitian yang dikemukakan oleh Simanjuntak (2001) menyatakan bahwa tingkat upah di setiap perusahaan berbeda-beda menurut biaya proporsi karyawan terhadap seluruh biaya produksi. Semakin kecil proporsi biaya karyawan dibandingkan dengan biaya keseluruhan, kenaikan upah bukan persoalan besar bagi pengusaha. Dengan kata lain, semakin kecil proporsi karyawan terhadap biaya keseluruhan, semakin tinggi tingkat upah. Pada kenyataannya tingkat upah yang relatif tinggi ditemukan pada perusahaan yang bersifat padat modal. Selain itu, hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh *Social Monitoring and Early Response Unit* (2003) menyatakan bahwa penerapan upah minimum di Jabotabek dan Bandung memberikan efek negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, akan tetapi terdapat karakteristik perusahaan tertentu yang tidak terpengaruh dengan adanya kenaikan upah minimum. Adapaun karakteristik perusahaan tersebut adalah perusahaan-perusahaan industri yang bersifat padat modal (*capital intensive*) seperti industri spare parts dan kimia/farmasi mampu memberikan tingkat upah yang lebih tinggi atau sama dengan upah minimum dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan industri yang bersifat padat tenaga kerja (*labor intensive*) seperti industri makanan/minuman, tekstil, garmen dan sepatu.

Pengaruh Jumlah Perusahaan Terhadap Permintaan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan

Hasil estimasi diperoleh bahwa secara parsial jumlah perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Jawa Barat. Hal tersebut terlihat dari nilai koefisien sebesar 0,467756 dan nilai probabilitasnya yang lebih besar dari α (0,05).

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari, et al (2020) tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2018”. Penelitian ini mengatakan bahwa jumlah industri tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena keberadaan industri yang bersifat padat modal sehingga penyerapan tenaga kerja tidak terpengaruh dengan banyak atau sedikitnya jumlah industri. Pada kenyataannya dengan jumlah industri yang terbatas telah mampu menyerap tenaga kerja. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafira (2019) tentang “Analisis Pengaruh Lama Pendidikan, Jumlah Perusahaan dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 1998-2017”. Penelitian ini mengatakan bahwa jumlah perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan pertumbuhan jumlah perusahaan setiap tahunnya selalu tidak mengalami peningkatan atau mengalami fluktuasi sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap juga tidak meningkat atau tetap dan juga bisa berkurang.

Pengaruh Output Terhadap Permintaan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan

Hasil estimasi diperoleh bahwa secara parsial output berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Jawa Barat. Hal tersebut terlihat dari nilai koefisien sebesar 0,155363 dan nilai probabilitasnya yang lebih kecil dari α (0,05) yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan output sebesar 1 persen, maka akan menurunkan permintaan tenaga kerja sektor industri pengolahan sebesar 0,15 persen.

Hal tersebut sejalan dengan teori yang di jelaskan oleh Arfida (2003) menyatakan bahwa pengaruh output terhadap permintaan tenaga kerja dimulai dari penurunan tingkat upah pasar. Turunnya upah pasar, biaya produksi perusahaan akan mengalami penurunan, jika diasumsikan harga produk konstan, maka penurunan biaya ini akan menaikkan kuantitas output yang memaksimalkan keuntungan. Untuk alasan tersebut perusahaan akan memperluas penggunaan tenaga kerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karib (2012) tentang “Analisis Pengaruh Produksi, Investasi, dan Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Sumatera Barat”. Penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel nilai produksi memiliki hubungan positif dengan jumlah tenaga kerja artinya semakin tinggi nilai produksi maka semakin tinggi pula jumlah tenaga kerja sektor industri Sumatera Barat. Selain itu, hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiawan (2013) tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Industri Kecil di Kabupaten Demak” menyatakan bahwa variabel nilai produksi berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Ketika terjadi peningkatan pada variabel nilai produksi maka terdapat penyerapan tenaga kerja di Industri Kecil Pengolahan Ikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah minimum kabupaten/kota tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Jawa Barat hal ini dikarenakan, secara umum perusahaan-perusahaan di Industri pengolahan adalah industri padat modal yang memiliki kemampuan membayar upah lebih tinggi daripada upah minimum yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah perusahaan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri pengolahan. Hal ini dikarenakan jumlah perusahaan umumnya bersifat padat modal.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel output memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa variabel jumlah perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Jawa Barat tahun 2017-2019, yang berarti semakin meningkatnya output akan menambah permintaan tenaga kerja sektor industri pengolahan.

SARAN

Pemerintah dan perusahaan dapat saling bekerja sama untuk menghasilkan keputusan yang terbaik dalam merumuskan kebijakan dibidang pengupahan. Selain itu adanya kebijakan upah minimum dapat memberikan insentif untuk pekerja agar dapat meningkatkan produktivitasnya.

Pemerintah diharapkan dapat menciptakan intensif berupa kemudahan dalam berusaha serta menjaga kualitas infrastruktur di darat dan di laut agar memudahkan distribusi barang dan jasa sehingga dapat menarik minat investor untuk mendirikan unit-unit usaha industri baru.

Pemerintah perlu memberlakukan kebijakan agar jumlah output di sektor industri pengolahan meningkat seperti diberlakukanya asuransi bagi setiap tenaga kerja agar adanya keterjaminan terhadap keberlangsungan tenaga kerja serta pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain melalui meningkatkan kualitas pendidikan dan mengadakan pelatihan yang mendukung permintaan tenaga kerja agar jumlah output yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja mampu meningkatkan produktivitas.

Kaufman, B. E., & Hotchkiss, J. L. (2000). *The Economic of Labour Market* (Fifth). Dryden Press.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfida, B. . (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia.
- Bellante, D., & Jackson, M. (1990). *Ekonomi Ketenagakerjaan* (Jakarta). Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Budiawan, A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Industri Kecil di Kabupaten Demak. *Economics Development Analysis Journal (EDAJ)*, 1–8.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2015). *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2, Edisi 5. Diterjemahkan Oleh : Raden Carlos Mangungsong*. Salemba Empat.
- Haryani. (2002). *Hubungan Industrial di Indonesia*. AMP YKPN.
- Ismei, A., Wijanarko, A., & Oktavianti, H. (2015). Analisis Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013. *Media Trend*, 10(1), 95–113.
- Jamal mirdad, A., & Trinanda Akhbar, R. (2018). Analisis Elastisitas Kesempatan Kerja Pada Sektor Indutri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan (REP)*, 3.
- Karib, A. (2012). Analisis Pengaruh Produksi, Investasi, dan Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(3), 53–73.
- Kurniasari, D. A., Indrawati, L. R., & Destiningsih, R. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2018. *Jurnal Universitas Tidar*, 548–562.
- Pindyck, R. S., & Rubienfield, D. L. (2009). *Mikroekonomi Edisi keenam Jilid 1*. Indeks.
- Raharjanti, A. V. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Penanaman Modal Asing dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur pada 33 Provinsi di Indonesia pada Tahun 2014-2017. *Skripsi*.
- Setiawan, A. H. (2010). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan (JEJAK)*, 3(1), 40–47.
- Soewardji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Mitra Wacana Media.
- Sumarsono, S. (2009). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu.
- Unit, S. M. and E. R. (2003). *Penerapan Upah Minimum di Jabotabek dan Bandung*.